

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, percepatan pertumbuhan merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Munculnya globalisasi sebagai sebuah fenomena menyebabkan saling ketergantungannya suatu negara dengan negara lain, yang berdampak jelas terhadap peningkatan kerjasama internasional. Indikator yang menunjukkan saling ketergantungan dan peningkatan kerjasama internasional tersebut salah satunya adalah adanya penanaman modal asing yang merupakan sumber dana dari luar negeri dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dalam menunjang pembangunan perekonomiannya.

Dengan berjalannya era globalisasi, kerjasama yang terjadi bukan lagi hanya pemerintah dengan pemerintah (*government to government*) tapi juga melibatkan aktor kelompok dan aktor individu (*people*) sehingga berjalanlah pola *transnasionalisme*, yang mengurangi peran negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor non-negara.¹ Selanjutnya dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi tersebut akan dapat mempengaruhi kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dalam suatu negara.

¹ Mas'ood, M. (1990). Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES. Hal: 230

Untuk negara berkembang seperti Indonesia, penanaman modal asing dianggap mampu menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu akibat kurangnya modal bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di segala aspek infrastruktur. Pemfokusan pembangunan yang selalu diletakkan di Ibu Kota Jakarta menyebabkan daerah lain terpacu melakukan pembangunan sendiri. Dengan disahkannya rezim otonomi daerah oleh pemerintah Indonesia menyebabkan setiap daerah mengupayakan kehadiran investor asing untuk mendukung harapan tersebut melalui kegiatan investasi, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan investor swasta dalam negeri untuk menopang seluruh pembangunan yang diharapkan bisa terwujud di DIY. Kegiatan investasi asing atau yang juga akan disebut dalam tulisan ini dengan istilah penanaman modal asing merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menciptakan sarana dan prasarana dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Karena penanaman modal pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan untuk mentransformasikan sumber daya potensial menjadi kekuatan ekonomi yang nyata.

Dengan adanya penanaman modal asing, maka beriringan pula transfer teknologi dan keahlian manajemen yang diberikan oleh investor asing tersebut untuk kemudian disesuaikan dan dimanfaatkan dengan proses pembangunan negara maupun wilayah tujuan penanaman modal tersebut. Dengan begitu, pemanfaatan modal asing tidak hanya akan mengatasi masalah keterbelakangan teknologi dan kelangkaan modal, namun lebih jauh dari itu akan membawa serta ketrampilan teknik, tenaga

ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik produksi yang maju serta pembaharuan dan diversifikasi produk.

Kelangkaan modal yang dialami Indonesia disebabkan karena beberapa faktor yang juga menjadi kerekarakteristik umum di setiap negara berkembang, antara lain:² 1) Standar hidup yang relatif rendah, sebagai akibat dari tingkat pendapatan yang rendah, ketimpangan pendapatan, kurang memadainya pelayanan kesehatan dan pendidikan. 2) Tingkat produktifitas yang rendah. 3) Tingkat pertumbuhan penduduk serta beban ketergantungan yang tinggi. 4) Angka pengangguran terbuka maupun terselubung yang sangat tinggi dan akan terus bertambah tinggi, sementara penyediaan lapangan kerja semakin terbatas. 5) Ketergantungan pendapatan yang sangat besar kepada sector produksi pertanian serta ekspor produk-produk primer (bahan mentah). 6) Pasar tidak sempurna dan informasi yang tersedia pun sangat terbatas. 7) Dominasi ketergantungan, kerapuhan yang parah pada hampir semua aspek hubungan internasional.

Sehingga, penanaman modal asing mempunyai peranan dalam mengisi kelangkaan sumber pembiayaan pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dan DIY khususnya. Dengan minimnya pembiayaan untuk pembangunan, banyak negara-negara berkembang yang berupaya untuk mendapatkan modal asing dengan menerapkan berbagai kebijakan dan pemberian fasilitas kepada para investor asing melalui pemerintah setempat, bahkan tak jarang beberapa daerah harus rela “menjemput bola”. Hal tersebut dilakukan untuk peningkatan kegiatan

² Todaro, M. P. (1998). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga. Hal: 45-46

pembangunan perekonomian, dan meningkatkan kualitas SDM demi tercapainya tujuan dari pembangunan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Konsekuensi dari diterapkannya otonomi daerah dewasa ini adalah kegiatan pembangunan daerah kini tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu daerah harus berfikir dan berjuang menghidupi daerahnya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya melalui kegiatan kerjasama, yaitu dengan menarik investor dalam negeri maupun luar negeri. Setiap daerah akan bersaing dalam upaya menarik investor dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan lingkungan berusaha kepada para investor tersebut, dan menjadi fokus utama kepada setiap hal yang menyangkut kebijakan-kebijakan, termasuk investasi asing.³ Maka dengan alasan untuk melaksanakan pembangunan dan peningkatan ekonomi secara merata, pemerintah memberikan regulasi yang dapat mengontrol penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia, kemudian pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui persetujuan Gubernur membuat peraturan-peraturan yang berkaitan tentang penanaman modal asing maupun dalam negeri sebagai upaya kerjasama internasional untuk mendukung pembangunan di daerah.

Berdasarkan hasil laporan yang telah disusun oleh Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY menyebutkan bahwa perkembangan penanaman modal di DIY pasca krisis keuangan global 2008 hingga tahun 2013 menunjukkan

³ Jatmika, S. (2001). Otonomi Daerah : Perspektif Hubungan Internasional. Yogyakarta: BIGRAF Publishing. Hal: 86

tren yang terus naik dengan lebih didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA). Sejak 2004, investasi yang masuk ke DIY baik dari PMA (Penanam Modal Asing) dan PMDN (Penanam Modal Dalam Negeri) terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2007 meningkat 1,37% dengan nilai investasi total sebesar Rp4,079 triliun dan pada 2008 meningkat lagi menjadi 7,45% atau Rp4,383 triliun. Sejak tahun 2007, investor yang masuk ke Yogyakarta didominasi PMA. Nilai investor PMA mencapai Rp2,278 triliun sedangkan PMDN hanya Rp1,801 triliun. Berikutnya, tahun 2008 PMA sebesar Rp2,577 triliun dengan PMDN hanya Rp1,806 triliun.⁴

Tabel. 1.1

Realisasi Investasi PMA dan PMDN DIY Tahun 2008-2013

Tahun	Investasi PMDN (Triliun Rp)	Investasi PMA (Triliun Rp)	PMA + PMDN (Triliun Rp)	Pertumbuhan (Triliun Rp)	Pertumbuhan (%)
2008	1.806*	2.577*	4.383*		7,45
2009	1.882.514.536.845	2.508.131.163.857	4.390.645.700.702	168.757.500.000	3,99
2010	1.960.638.890.124	2.612.218.607.157	4.572.857.497.281	182.211.796.579	4,15
2011	2.313.141.695.784	4.110.436.324.224	6.423.578.020.008	1.842.605.192.764	40,22
2012	2.805.944.605.930	4.250.121.535.829	7.056.066.141.759	632.488.121.751	9,85
2013	2.864.654.491.755	5.203.115.642.883	8.067.770.134.638	1.011.703.992.879	14,338

Sumber: Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY (Diolah)

*Keterangan: *) Nilai PMDN, PMA dan PMA+PMDN dalam triliun yang di bulatkan.*

⁴ Tomiedpate. (21 Juli 2010). Peluang Investasi DIY. Diakses 1 Maret 2015, dari WordPress: <http://tomiedpate.wordpress.com/2010/07/21/peluang-investasi-di-diy/>

Data di atas sekaligus menunjukkan bahwa minat pihak asing untuk menanamkan modalnya di DIY dari tahun ke tahun terus meningkat. Jika investasi bertambah, sesuai dengan mekanisme *multiplier effect*, maka akibatnya pendapatan daerah juga akan bertambah. Hal tersebut tentunya akan membuat naiknya tingkat perekonomian suatu daerah atas dasar naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan bertambahnya nilai penanaman modal, produsen akan meningkatkan jumlah kesempatan kerja sehingga jumlah barang dan jasa yang dihasilkan akan bertambah pula. Pada gilirannya, masyarakat dapat mengkonsumsi barang dan jasa dalam jumlah yang banyak. Hal tersebut berarti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga menjadi lebih baik.

Tabel. 1.2

Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2008-2013

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	4,43	4,88	5,16	5,32	5,40

Sumber: BPS, Provinsi DIY (Diolah)

Tabel di atas menunjukkan realisasi PAD dari sektor penanaman modal berbanding positif dengan peningkatan perekonomian DIY dari tahun ke tahun. Hanya pada saat krisis finansial global yang melanda negara-negara Eropa pada tahun 2008 secara tidak langsung terbukti juga berdampak pada perekonomian daerah suatu negara. Pertumbuhan ekonomi di DIY pada tahun 2009 justru turun sebesar 0,60%

padahal saat itu laju inflasi sedang mencapai 2,93% atau inflasi terkecil sejak 20 tahun. Namun, menurunnya perekonomian DIY pada tahun 2009 terjadi tidak berlarut-larut. Bahkan pada tahun selanjutnya pasca krisis ekonomi global perekonomian DIY menunjukkan pergerakan yang positif, yaitu terus merangkak naik dari tahun 2010-2013 dengan laju pertumbuhan melebihi pertumbuhan ekonomi 2008 yaitu 5,12%. Tercatat pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi DIY menyentuh angka 5,40%.

Mengingat pentingnya pemasukan atau pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari modal investasi untuk menopang perekonomian, sejak saat itu Pemrov DIY berkomitmen untuk lebih menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Selanjutnya, ditetapkannya Perda Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.⁵ Hasilnya, pada periode 2008-2013 nilai PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) DIY mengalami peningkatan di semua sektor kecuali sektor pertanian yang mengalami penurunan. Kontribusi yang paling signifikan pada pertumbuhan perekonomian di DIY didominasi oleh empat sektor dari duabelas sektor yang ada yaitu sektor jasa-jasa; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan; serta sektor pertanian yang walaupun mengalami

⁵ BKPM. (2012). Tentang BKPM. Diakses 20 April 2013, dari Jogja Inves: <http://www.jogjainvest.jogjaprov.go.id/id/tentang-bkpm>

penurunan dari tahun ke tahun tetapi masih menempati empat besar PDRB DIY. Fenomena ini sekaligus menunjukkan, bahwa perekonomian DIY mengalami pergeseran dari perekonomian agraris menuju niaga jasa.⁶

Iklim berinvestasi di DIY pun cenderung lebih baik dengan tren positif naik setiap tahunnya dibanding daerah lain di Indonesia. Nilai realisasi investasi yang terjadi di DIY baik PMA maupun PMDN selalu stabil di atas satu triliun setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa minat investor untuk menanamkan modalnya terutama modal asing di DIY cukup tinggi. Data dari *World Bank* juga menyebutkan bahwa DIY merupakan kota terbaik untuk mendirikan usaha di Indonesia.⁷

Untuk meningkatkan nilai investasi, DIY menempuh arah kebijakan yaitu perbaikan iklim penanaman modal melalui penguatan kelembagaan dan koordinasi penanaman modal, mendorong persebaran penanaman modal di kabupaten/kota serta pemberian fasilitas dan kemudahan perijinan.⁸ Selain itu ada hal lain yang dapat mempengaruhi arus investasi tersebut yaitu tersedianya fasilitas (prasarana). Sarana dan prasarana (infrastruktur) merupakan hal yang sangat menentukan terealisasinya atau tidak suatu proyek investasi. Penyediaan fasilitas (prasarana) PMA di suatu negara merupakan salah satu usaha yang sering dilakukan oleh suatu negara untuk dapat menarik para investor melakukan investasi di negaranya. Penyediaan fasilitas

⁶ Pemprov DIY. (2013). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2012-2017. Yogyakarta: BPPD DIY. Hal: 36

⁷ Suprpto, H. (2 Februari 2012). Bisnis: 10 Kota Termudah Berusaha di RI. Diakses 5 November 2014, dari VIVA.co.id: <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/284900-10-kota-termudah-untuk-mendirikan-usaha>

⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017, Op.Cit., Hal: 343

(prasarana) PMA antara lain berupa jalan, pembangkit tenaga listrik, jaringan telekomunikasi dan sarana transportasi, serta kemudahan dalam perizinan yang diberikan oleh pemerintah penerima penanaman modal asing tersebut.

Modal asing yang tertanam di wilayah DIY merupakan sebuah motor pembantu untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Karena dengan modal asing pemerintah menjadi lebih mudah untuk memaksimalkan setiap potensi yang ada di berbagai sektor yang dimiliki. Sebagai contoh sektor pariwisata yang menjadi unggulan DIY, dengan pembangunan hotel oleh investor akan membuat lebih banyak wisatawan lokal maupun mancanegara berbondong-bondong datang ke DIY. Selanjutnya pada sektor ekonomi dapat dilihat tumbuh makin banyaknya perusahaan MNC (*Multi National Corporation*) sebagai aktor baru dalam hubungan internasional, seperti restaurant cepat saji, perusahaan air minum, dan *hypermarket* serta sektor kerajinan (*handy craft*). Hasilnya adalah PAD DIY akan meningkat, lapangan pekerjaan baru, transfer teknologi, investasi infrastruktur fisik, pendapatan dari pajak, serta memperoleh pekerja yang terampil.

Namun akibat semakin mudahnya kegiatan penanaman modal disertai dengan faham liberalisasi perdagangan dan investasi yang disepakati dalam forum-forum perdagangan internasional dewasa ini seperti (ACFTA, AFTA, dan MEA 2015), tentunya PMA juga menyebabkan berbagai masalah sosial. Forum Ekonomi Dunia/*World Economic Forum* (WEF, 2014) menunjukkan posisi daya saing

Indonesia masih berada di peringkat 38 dari 148 negara di dunia.⁹ Menjamurnya perusahaan MNC tak ayal membuat daya saing produk lokal akan kalah bersaing dengan produk-produk luar negeri yang membanjiri pasar dalam negeri serta produk lokal juga akan sulit bersaing di pasar Internasional. Akibatnya harga kebutuhan pokok yang masih akan tetap tinggi. Dari segi kemudahan investasi, saat ini dapat dirasakan semakin menjamurnya hotel, mall, perumahan, dan minimarket/supermarket di setiap sudut DIY terutama kota Yogyakarta. Data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta, pada tahun 2013 terdapat 60 proposal perijinan hotel baru berkualifikasi bintang 3, 4 dan 5.¹⁰ Jika pembangunan hotel baru semakin tak terkendali maka dampak negatifnya adalah harga kamar menjadi liar dan persaingan harga tidak sehat akan terjadi. Hal tersebut nantinya akan dapat merugikan karena berimbas pada minat kunjungan wisatawan. Tidak hanya sampai disitu dampak pembangunan hotel yang terus meningkat di Yogyakarta dari tahun ke tahun kini mulai dirasakan. Lahan hijau di Jogja jadi semakin berkurang, polusi udara, kelangkaan air tanah dan kemacetan lalu lintas. Hal ini yg membuat maraknya demonstrasi yang dilakukan masyarakat atas pembangunan apartemen di berbagai wilayah di DIY yang semakin tak terkendali, bahkan muncul sebuah tagline “Jogja Ora Didol” sebagai bentuk protes akan hilangnya kearifan lokal di DIY.

Dengan adanya pro dan kontra dampak positif dan negatif dari kehadiran penanaman modal asing (yang paling dominan di DIY), maka penulis ingin

⁹ Schwab, K. (2013). The Global Competitiveness Report 2013-2014 . World Economy Forum.

¹⁰ Alexander, H. B. (14 Mei 2013). Properti: 60 Hotel Penuhi Yogyakarta. Diakses 14 Agustus 2013, dari KOMPAS.COM:

<http://properti.kompas.com/read/2013/05/14/12550491/60.Hotel.Penuhi.Yogyakarta>

memberikan penjelasan tentang bagaimana peranan pemerintah DIY dalam hal ini BKPM dalam mengelola investasi asing yang masuk sebagai pendorong perekonomian DIY untuk kurun waktu 2008-2013. Hal ini karena seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa daerah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.¹¹ Sehingga kebijakan yang dibuat akan sangat berpengaruh terhadap laju jumlah investasi yang secara langsung berpengaruh terhadap perekonomian DIY.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana peran BKPM DIY dalam mengelola penanaman modal asing sebagai pendorong perekonomian di DIY ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan berbagai informasi berupa data-data yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

¹¹ Penjelasan Umum Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. Mengetahui peranan yang dilakukan oleh BKPM DIY dalam pengelolaan Penanaman Modal Asing (PMA) di perekonomian DIY selama kurun waktu 2008-2013.
3. Membuktikan tindakan yang dilakukan oleh BKPM DIY mengacu pada tugas dan fungsi BKPM dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 49 Tahun 2010.
4. Untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan teori dan membuktikan hipotesa yang ada.
5. Untuk memenuhi prasyarat guna memperoleh gelar S-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Menerapkan teori-teori yang pernah penulis dapatkan selama di bangku kuliah yang berhubungan dengan mata kuliah Ekonomi Politik Internasional, Ekonomi Makro, Perdagangan Internasional, Hukum Internasional, Politik Lingkungan Global dan Pengantar Hubungan Internasional.

D. Kerangka Pemikiran / Teori atau Konsep

a. Magic of The Marketplace

Magic of The Marketplace atau bisa disebut dengan konsep keajaiban pasar adalah sebuah konsep yang muncul dari pidato Ronald Reagan dalam pelantikannya sebagai presiden Amerika Serikat yang ke 40 yaitu periode tahun 1981-1989. Sebagai presiden, Ronald Reagan menerapkan inisiatif menyapu politik dan ekonomi baru.

Sisi penawaran ekonomi dan kebijakan ekonominya dijuluki atau terkenal dengan istilah *Reaganomics*. Yaitu hanya dengan mengurangi pengeluaran di pemerintahan kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Program Reagan untuk pemulihan ekonomi memiliki empat tujuan kebijakan utama:¹² (1) mengurangi pertumbuhan pengeluaran pemerintah, (2) mengurangi tarif pajak marjinal atas penghasilan dari tenaga kerja dan modal, (3) mengurangi regulasi, dan (4) mengurangi inflasi dengan mengendalikan pertumbuhan jumlah uang beredar. Perubahan yang terjadi pada kebijakan utama ini diharapkan dapat meningkatkan tabungan dan investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyeimbangkan anggaran, mengembalikan pasar keuangan yang sehat, dan mengurangi inflasi dan suku bunga.

Pernyataan Ronald Reagan yang terkenal tentang keajaiban pasar atau *magic of the market place* seperti yang dikutip dalam pidatonya terhadap anggota IMF dan Bank Dunia adalah sebagai berikut:¹³ *“Kita yang hidup dalam kehidupan pasar bebas percaya bahwa pertumbuhan, kemakmuran dan pemenuhan kebutuhan manusia diciptakan dari bawah ke atas, bukan pemerintah turun. Bertentangan dengan gagasan bahwa kontrol pemerintah yang kaku sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera, kemajuan yang luas dan bebas, pendapatan yang besar dan kekayaan SDA. Apa yang*

¹² Niskanen, W. A. (2002). Encyclopedia: The Concise Of Economic Encyclopedia: Reaganomics. Diakses 30 Juli 2015, dari Library Of Economic and Liberty Website: <http://www.econlib.org/library/Enc1/Reaganomics.html>

¹³ Perry, M. J. (26 September). Quotation of the day on the ‘magic of the marketplace’. Diakses: 1 Agustus 2015, dari AEI Blog: <https://www.aei.org/publication/quotation-of-the-day-on-the-magic-of-the-marketplace/>

menyatukan mereka semua adalah imbas dari kesediaan mereka untuk percaya pada keajaiban pasar.”

Konsep *magic of the market place* ini selanjutnya digunakan oleh BKPM DIY sebagai lembaga yang berwenang mengelola seluruh kegiatan investasi, untuk meningkatkan investasi asing di DIY. Diantaranya adalah kebijakan fasilitasi dan mempermudah perizinan. Hal ini dilakukan BKPM DIY dengan cara menjemput bola calon investor dengan program kunjungan kerja dan promosi keunggulan, perbaikan sarana dan prasarana di daerah terpencil, peningkatan kualitas SDM dan pada proses perizinan dengan sistem PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), sehingga proses perizinan investasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dalam satu tempat.

Dengan adanya dilakukannya regulasi di atas akan membuat iklim investasi di DIY semakin baik yang nantinya akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya, sehingga akan terjadi pertumbuhan perekonomian atas dasar modal asing. Kesejahteraan daerah juga akan tercipta seiring percayanya masyarakat akan keajaiban pasar.

b. Teori Peran (Role Theory)

Peran (role) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Seseorang yang menduduki posisi tersebut diharapkan berperilaku sesuai sifat posisi yang ditempati itu. Teori peranan menjelaskan bahwa

“perilaku politik adalah perilaku dalam menjelaskan peranan politik.”¹⁴ Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan yang kebetulan dipegang aktor politik.

Menurut K.J Holsti, konsep peranan bisa dianggap sebagai definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan dan fungsi negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional.¹⁵

Atas dasar tersebut adapun pihak yang memegang peran terhadap kelangsungan kegiatan investasi di DIY diantaranya adalah Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Mengingat pentingnya modal asing sebagai pendorong perekonomian DIY, atas prakarsa BKPM, Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan peranannya dengan melakukan kunjungan kerja ke berbagai negara diantaranya Turki, Taiwan dan Washington DC Amerika Serikat pada tahun 2013. Tujuan kunjungan kerja tersebut adalah sebagai promosi pengenalan potensi sumber daya yang ada di DIY untuk dapat menarik minat investor. Peran lain yang tak kalah penting yang dilakukan Sultan sebagai raja DIY adalah menjaga agar kearifan lokal DIY tetap terjaga dengan baik dibalik derasnya arus globalisasi dewasa ini. Hal ini dilakukan dengan memproteksi tanah-tanah warisan keraton agar tidak dapat di alih fungsikan untuk kegiatan yang bersifat permanen, seperti pembangunan. Sultan juga meminta bahwa pembangunan di DIY khususnya hotel dan mall harus terkendali

¹⁴ Mas'od, M. (1998). Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisa dan Teorisi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Hal: 44

¹⁵ Holsti, K. J. (1997). Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis (Terjemahan Wawan Juanda). Bandung: Bina Cipta. Hal: 159

dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial.¹⁶ Kawasan khususnya di Kota Yogyakarta yang sebaiknya tidak dibangun hotel adalah seperti di kawasan Kotagede dan kawasan budaya lain yang ada di Kota Yogyakarta seperti Kraton dan Pakualaman agar dapat terus mengembangkan kebudayaan yang dimiliki untuk mendukung keistimewaan Yogyakarta.

Tidak hanya Sri Sultan HB X, berlandaskan teori peranan, BKPM DIY sebagai lembaga pemerintah non departemen dalam menjalankan kelembagaannya berpedoman terhadap aturan-aturan berdasarkan UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Selanjutnya BKPM DIY dalam menjalankan peran berdasarkan tugas dan fungsi mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 49 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal, Pasal (2) dan (3). Adapun bunyi Pasal (2) dan (3) adalah:¹⁷

- 2) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang kerjasama dan penanaman modal.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

¹⁶ Hafil, M. (21 Agustus 2014). DIY: Sultan Minta Pembangunan Hotel Harus Terkendali. Diakses 2 Agustus 2015, dari Republika.com: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/14/08/21/nanc43-sultan-minta-pembangunan-hotel-harus-terkendali>

¹⁷ Peraturan Gubernur DIY No.49 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal

- a. Penyusunan program kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perizinan serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perizinan serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- c. Penyelenggaraan koordinasi kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perizinan serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- d. Penyelenggaraan dan monitoring evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri.
- e. Perumusan rencana umum penanaman modal dan promosi potensi daerah.
- f. Pemberian fasilitasi pelayanan dan perizinan penanaman modal.
- g. Penyelenggaraan, pengawasan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penanaman modal.
- h. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian dibutuhkan peranan yang sangat vital oleh BKPM DIY dalam menentukan laju penanaman modal khususnya modal asing di DIY dalam setiap kebijakannya, karena modal asing sangat menentukan masa depan perekonomian di DIY.

c. Konsep Penanaman Modal

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam kaitannya dengan berbagai faktor yang mempengaruhi masuknya modal asing di suatu negara. Menurut teori Alan M. Rugman, ada dua faktor terpenting yang mempengaruhi penanaman modal asing yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi.¹⁸

1. Variabel Lingkungan. Variabel Lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik negara atau faktor spesifik lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu: ekonomi, non-ekonomi dan modal pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif, yang secara definitif meliputi semua input faktor yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja, modal (dana), teknologi, dan tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen yang disebut *human capital*. Adapun variabel non ekonomi yang memotivasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, hukum dan sosial budaya yang melekat pada suatu negara. Ada beberapa pengamat yang juga memasukkan faktor pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada suatu negara (*clean government and good governance*) baik tuan rumah (*host country*) ataupun pemerintah asal penanam modal itu. Selain itu sikap pemerintah yang lebih terbuka dengan segala kebijakannya yang tidak memberatkan para investor asing yang ingin

¹⁸ Rugman, A. M. (1985). *International Business: Form and Environment*. New York: Mc Graw Hill Book. Hal: 73-92

menanamkan modalnya juga menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam penanaman modal di suatu lokasi.

2. Variabel Internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan. Ini merupakan variabel perusahaan yang kadang juga disebut sebagai faktor spesifik pemilikan.

Dalam hal ini DIY sebagai tuan rumah (*host country*) harus memperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi kondisi penanaman modal asing di antaranya dari sudut pandang variabel lingkungan. Pemerintah daerah dalam hal ini BKPM harus berupaya untuk mencari ciri khas yang membedakan dengan daerah lain. BKPM harus mampu menciptakan kondisi lingkungan investasi di DIY yang bersahabat dengan investor, agar menjadi daerah yang menjadi tujuan utama investasi di Indonesia.

E. Hipotesa

Dengan melihat permasalahan yang telah diuraikan diatas dan didukung oleh teori-teori yang dianggap dapat membantu analisa, maka hipotesa yang dapat dikemukakan adalah bahwa penanaman modal asing pada era globalisasi saat ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap perekonomian suatu daerah, sehingga pemerintah DIY (BKPM) mempunyai peran yang vital dalam mengelola PMA. Peran yang dilakukan BKPM DIY sebagai tugas dan fungsi BKPM sesuai dengan Pergub DIY No.49 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Dan Unit

Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama, pasal (2) dan (3) dan Teori atau Kerangka Pemikiran dalam tulisan ini adalah:

1. Menjalin hubungan kerjasama internasional baik dengan pemerintah negara maupun aktor-aktor non negara melalui kegiatan promosi potensi dengan menyusun strategi promosi daerah di DIY.
2. Merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan rencana umum penanaman modal.
3. Menyelenggarakan program fasilitasi dengan menciptakan kondisi lingkungan investasi yang kondusif, meningkatkan sarana dan prasarana dan kualitas SDM

F. Jangkauan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dan guna menghindari pembahasan yang terlalu melebar, maka penulis mengambil Jangkauan Penelitian pada keadaan perekonomian DIY dalam kaitannya dengan penanaman modal asing selama kurun waktu 2008-2013. Jangkauan ini dipilih dengan alasan pasca krisis keuangan global 2008 yang melanda dunia internasional dampaknya juga dirasakan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi di hampir setiap daerah di Indonesia termasuk DIY. Sehingga akan menarik untuk mencermati peran BKPM DIY dalam upaya peningkatan kembali perekonomian DIY melalui kegiatan penanaman modal asing. Mengingat penanaman modal merupakan faktor yang penting dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah.

G. Metodologi Penelitian

a. Data Yang Dibutuhkan

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana peran sebuah lembaga pemerintah non departemen dalam menyikapi pertumbuhan masuknya penanaman modal asing di DIY. Dengan demikian maka data yang dibutuhkan sebagai bahan analisa adalah: Data tentang penanaman modal asing dan kerjasama internasional yang terlaksana di DIY. Selanjutnya data tentang perkembangan perekonomian DIY dalam kurun waktu 2008-2013. Dan yang terakhir data tentang konsep *magic of the market place, role theory*, dan tentang penanaman modal.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti diatas, dilakukan dengan cara pengumpulan data Dokumentasi: yaitu cara mengumpulkan data dengan mencari, melihat, mengabadikan, memeriksa dan mempelajari dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

c. Jenis Penelitian

Penelitian perpustakaan (*Library Research*) atau penelitian dengan cara membaca, mempelajari berbagai literatur seperti jurnal, majalah, surat kabar, sumber internet dan penelitian yang masih terkait dijadikan sebagai referensi yang relevan untuk mendapatkan landasan teori yang akan diterapkan pada masalah yang diteliti.

d. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya menggambarkan atau menguraikan asail dari pengamatan (observasi gejala, peristiwa dan kondisi aktual). Sedangkan kualitatif artinya naratif atau paparan yang secara lahiriah berwujud susunan kata dan kalimat yang dituangkan dalam skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

- BAB I : Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran/teori atau konsep, hipotesa, jangkauan penelitian, metodologi penelitiandan sistematika penulisan.
- BAB II : Memaparkan tentang kondisi umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta kondisi perekonomiannya pasca krisis keuangan global 2008.
- BAB III : Bab ini akan membahas kerjasama internasional DIY melalui PMA. Pembahasan akan dimulai dengan memaparkan tentang sejarah dan landasan hukum investasi. Dilanjutkan melihat kehadiran PMA sebagai wujud kerjasama internasional DIY melalui realisasi PMA dan peluang investasi. Kemudian juga memaparkan hambatan atau ancaman serta dampak positif dan negatif dari kegiatan PMA.
- BAB IV : Bab ini berisikan gambaran umum tentang peran BKPM DIY dalam mengelola Penanaman Modal Asing sebagai pendorong perekonomian

di DIY. Berisi dasar hukum BKPM dan langkah-langkah atau prosedur PMA serta kebijakan oleh BKPM DIY.

BAB V : Bab ini berisikan Kesimpulan. Yaitu merupakan penegasan kembali atas jawaban dari pertanyaan yang ada pada rumusan masalah dan pembuktian hipotesa.